

Katalog BPS: 4301002.51

STATISTIK PENDIDIKAN PROVINSI BALI 2013



<http://bali.bps.go.id>

TINGKATKAN KEBERAKSARAAN



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**

STATISTIK PENDIDIKAN PROVINSI BALI 2012



TINGKATKAN KEBERAKSARAAN
TINGKATKAN KEBERAKSARAAN

STATISTIK PENDIDIKAN PROVINSI BALI TAHUN 2012

ISBN : 979 473 987 1

Nomor Publikasi : 51520.1306

Katalog BPS : 4301002.51

Ukuran Buku : 21 x 28 cm

Jumlah Halaman : 58 Halaman.

Penulis:

A.A. Dirga Kardita

Mulyani Puji Lestari

Editor:

Indra Susilo. DP.Sc., MM.

Pengolah Data:

Mulyani Puji Lestari

Gambar Kulit:

Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

PENGANTAR

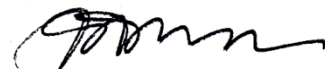
Publikasi Statistik Pendidikan Provinsi Bali Tahun 2012 ini merupakan publikasi rutin yang disusun setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Publikasi ini menyajikan data yang dikumpulkan langsung oleh BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional triwulanan selama tahun 2012, untuk memberikan gambaran kondisi Pendidikan di Bali secara umum.

Penyajian publikasi ini disusun secara diskriptif dalam bentuk narasi, ulasan singkat, dan grafik yang berbasis gender, serta dilampirkan tabel-tabel pendukung untuk menunjang informasi.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terbitnya publikasi ini disampaikan ucapan terima kasih. Saran dan kritik yang konstruktif sangat kami hargai untuk perbaikan publikasi yang akan datang, SEJAHTERA BUAT KITA SEMUA.

Denpasar, September 2013

Kepala BPS Provinsi Bali,



Ir. I Gde Suarsa, M. Si,
NIP. 1955 0628 197903 1 002

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v-
vii	
BAB I. Pendahuluan.	1
1.1. Latar Belakang.	1
1.2. Tujuan.	3
1.3. Sumber Data.	4
1.4. Sistematika Penulisan.	4
BAB II. Metodologi.	5
2.1. Ruang Lingkup.	5
2.2. Kerangka Sampel.	6
2.3. Rancangan Sampel.	6
2.4. Metode Pengumpulan Data.	7
2.5. Metode Penghitungan.	7
2.6. Pengolahan Data.	8
BAB III. Konsep Dan Definisi.	9
BAB IV. Pembahasan.	12
4.1. Angka Partisipasi Sekolah.	13
4.1.1. Angka Partisipasi PAUD	14
4.1.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD, SLTP, SLTA	16
4.1.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SLTP, SLTA	20
4.1.4. Angka Partisipasi Murni (APM)	22
4.2. Angka Buta Huruf	24
4.3. Angka Anak Putus Sekolah.	28
4.4. Penduduk Yang Tidak Bersekolah Lagi.....	30
4.4. Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan.	32
BAB V. Penutup.	35
5.1. Kesimpulan.	35

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1: Persentase Penduduk Usia 4-6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Sekolah dan jenis kelamin, Provinsi Bali 2012.....	16
Tabel 2 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2012	18
Tabel 3 : Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SLTP dan SLTA, Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2012	20
Tabel 4 : Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SLTP, dan SLTA Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2012	22
Tabel 5 : Jumlah Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah, Tipe Daerah dan Jenis Kelmain, Provinsi Bali Tahun 2012	31
Tabel 6 : Persentase penduduk 7-18 Tahun Menurut Alasan Tidak Bersekolah dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2012	32

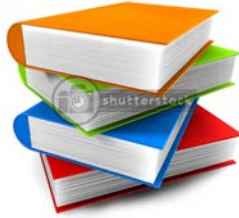
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun, 13-15 Tahun, dan 16-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2012	17
Gambar 2 : APK Pendidikan SD, SMP, dan SMA, berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Bali Tahun 2012	21
Gambar 3 : Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas Yang Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2012	26
Gambar 4 : Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2012	27
Gambar 5 : Persentase Penduduk Putus Sekolah, Menurut Jenjang Pendidikan Dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2012	29

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 09 : Persentase Penduduk Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2012.....	35
Tabel 10 : Persentase Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2012.....	36
Tabel 11 : Persentase Penduduk Laki dan Perempuan Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2012.....	37
Tabel 12 : Persentase Penduduk Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur serta Kemampuan Membaca dan Menulis, Provinsi Bali Tahun 2012.....	38
Tabel 13 : Persentase Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur serta Kemampuan Membaca dan Menulis, Provinsi Bali Tahun 2012.....	39
Tabel 14 : Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur serta Kemampuan Membaca dan Menulis, Provinsi Bali Tahun 2012	40
Tabel 15 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2012	41
Tabel 16 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2012	42
Tabel 17 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2012.....	43
Tabel 18 : Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2012	44
Tabel 19 : Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2012	45
Tabel 20: Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2012.....	46

Tabel 21 : Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Laki-laki Menurut Kabupa-ten/Kota dan Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2012.....	47
Tabel 22 : Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Perempuan Menurut Kabupa-ten/Kota dan Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2012	48
Tabel 23 : Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Laki-laki dan Perempuan Me-nurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2012.....	49
Tabel 24 : Persentase Penduduk Laki-laki Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Kabu-paten/Kota dan Ijasah Tertinggi Yang Dimiliki, Provinsi Bali Tahun 2012.....	50
Tabel 25 : Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Kabu-paten/Kota dan Ijasah Tertinggi Yang Dimiliki, Provinsi Bali Tahun 2012.....	51
Tabel 26 : Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijasah Tertinggi Yang Dimiliki, Provinsi Bali Tahun 2012.....	52
Tabel 27 : Persentase Penduduk Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, Provinsi Bali Tahun 2012	53
Tabel 28 : Persentase Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, Provinsi Bali Tahun 2012	54
Tabel 29 : Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, Provinsi Bali Tahun 2012.....	55
Tabel 30 : Persentase Penduduk Laki-laki Usia 4-6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Dalam Pendidikan Pra Sekolah, Provinsi Bali Tahun 2012.....	56
Tabel 31 : Persentase Penduduk Perempuan Usia 4-6 Tahun Menurut Kabupaten/ Kota dan Keikutsertaan Dalam Pendidikan Pra Sekolah, Provinsi Bali Tahun 2012..	57
Tabel 32 : Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Usia 4-6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Dalam Pendidikan Prasekolah, Provinsi Bali Tahun 2012	58



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional dibidang pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang memungkinkan warganya mengembangkan diri sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Pendidikan merupakan upaya yang terorganisir, berencana dan berlangsung kontinu (terus menerus sepanjang hayat) ke arah membina manusia/anak didik menjadi insan paripurna, dewasa dan berbudaya (civilized). Terorganisir memiliki makna bahwa pendidikan tersebut dilakukan oleh usaha sadar manusia dengan dasar dan tujuan yang jelas, ada tahapannya dan ada komitmen bersama. Adapun berencana mengandung arti bahwa pendidikan itu direncanakan sebelumnya, dengan suatu perhitungan yang matang dan berbagai sistem pendukung yang disiapkan. Sementara berlangsung kontinu berarti bahwa pendidikan itu berlangsung terus menerus sepanjang hayat, yaitu sepanjang manusia hidup di muka bumi.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 menggariskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pada umumnya pendidikan dilakukan secara berjenjang dimulai dari jenjang pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar (meliputi SD dan SMP atau sederajat), pendidikan menengah (meliputi SMA dan SMK, atau sederajat), dan pendidikan tinggi (strata dan non strata).

Pentingnya pendidikan yang berkualitas semakin disadari, sebab terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat yang maju dan mandiri hanya dapat diwujudkan jika pendidikan masyarakat berhasil ditingkatkan (Mutofin,1996:24). Tidak sedikit memang kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas manusia. Disamping sarana dan prasarana pendidikan seperti; jumlah sekolah, kuantitas serta kualitas guru, berbagai hal-hal lain yang menunjang kegiatan pendidikan sangat diperlukan sebagai satu kesatuan yang saling menunjang dan saling mengkait. Betapa sulit dan peliknya masalah yang dihadapi, terkadang ketika satu masalah dapat diselesaikan, akan muncul lagi satu atau beberapa masalah lain. Ketimpangan pembangunan di bidang ekonomi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi berbedanya tingkat pendidikan antar penduduk di daerah perkotaan dan perdesaan, disamping kultur sosial dan budaya yang berbeda antar daerah juga masih cukup kuat memberi warna terhadap kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk laki-laki dan perempuan.

Bidang pendidikan merupakan bidang penentu program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bidang pendidikan ini mendapat perhatian serius pembangunan daerah Bali, mengingat Bali tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sehingga hanya mengandalkan kualitas sumber daya manusia melalui inovasi dan kreasinya untuk mampu membawa Bali bersaing dalam tataran global.

Dalam publikasi "*Statistik Pendidikan Provinsi Bali Tahun 2012*" ini disajikan data pendidikan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012 berupa rangkuman beberapa indikator pendidikan.

Gambaran keadaan pendidikan di Provinsi Bali akan dilihat secara khusus melalui beberapa indikator penting yakni kemampuan baca tulis penduduk (Angka Melek Huruf), Tingkat Partisipasi Sekolah meliputi Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Siswa Menurut Jenjang Pendidikan dan Partisipasi Sekolah Anak Usia Pra Sekolah. Indikator-indikator tersebut merupakan indikator pendidikan yang biasanya dipakai untuk mengukur hasil pembangunan bidang pendidikan, misalnya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1.2. TUJUAN

Publikasi ini disusun untuk menyediakan data tentang keadaan kesejahteraan penduduk dilihat dari sektor pendidikan yang meliputi kemampuan baca tulis, tingkat pendidikan yang ditamatkan dan atau status pendidikan yang sedang diikuti. Secara spesifik, tujuan penyusunan publikasi ini antara lain adalah;

1. Menyediakan data statistik berupa gambaran pendidikan penduduk Provinsi Bali.
2. Menyediakan data dasar pendidikan Provinsi Bali untuk membantu pemangku kepentingan dalam mengambil berbagai kebijakan publik khususnya di bidang pendidikan.

3. Memberikan gambaran kepada Pemerintah Provinsi Bali dalam mengevaluasi pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan.

1.3. SUMBER DATA

Indikator pendidikan bersumber dari data hasil Susenas Kor tahun 2012. Susenas merupakan survei tahunan yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan dengan cakupan relatif luas. Pelaksanaan Susenas dilaksanakan secara serempak diseluruh Indonesia. Untuk Provinsi Bali, sampelnya tersebar di sembilan kabupaten/kota mencakup seluruh kecamatan baik wilayah perkotaan dan perdesaan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Publikasi ini tersusun dalam 5 (lima) bab, dilengkapi tabel-tabel lampiran dengan sistematika ;

BAB I. PENDAHULUAN, meliputi Latar Belakang, Tujuan Penulisan, Sumber Data, dan Sistematika Penulisan.

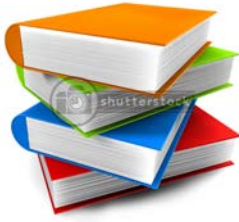
BAB II. METODOLOGI, meliputi Ruang Lingkup, Kerangka Sampel, Rancangan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Pengolahan Data.

BAB III. KONSEP DAN DEFINISI, meliputi berbagai konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini.

BAB IV. PEMBAHASAN, meliputi Angka partisipasi Sekolah, Angka Buta Huruf, Angka Putus Sekolah, Penduduk Tidak Sekolah, dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

BAB V. PENUTUP

TABEL-TABEL LAMPIRAN



BAB II

METODOLOGI

Publikasi ini disusun berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) secara triwulanan tahun 2012. Data yang digunakan dalam publikasi ini merupakan sampel kumulatif dari empat triwulan yang ada di Tahun 2012. Seperti halnya publikasi tahun sebelumnya, metodologi, konsep dan definisi Susenas tetap dicantumkan untuk memberikan arah dan panduan dalam pemanfaatan data yang disajikan.

2.1. RUANG LINGKUP

Susenas 2012 dilaksanakan di seluruh wilayah geografis Indonesia dengan ukuran sampel sebesar 300.000 rumah tangga tersebar dalam daerah perkotaan maupun perdesaan. Untuk Provinsi Bali, jumlah sampelnya sebanyak 5.760 rumah tangga, tersebar dalam 576 blok sensus¹ di wilayah perkotaan dan perdesaan. Data yang dikumpulkan dalam Susenas meliputi keterangan umum anggota rumah tangga, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, fertilitas, perumahan, pengeluaran rumah tangga, dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

¹ Blok sensus adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja seorang petugas pencacah. Syarat blok sensus adalah harus memiliki batas-batas yang mudah dikenali, terletak dalam satu hamparan, serta setiap desa/kelurahan dibagi habis menjadi beberapa blok sensus.

2.2. KERANGKA SAMPEL

Kerangka sampel yang digunakan untuk pemilihan blok sensus terdiri dari 2 jenis yaitu kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus, dan kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga dalam blok sensus terpilih. Kerangka sampel blok sensus daerah perkotaan/perdesaan adalah daftar blok sensus yang terdapat di daerah perkotaan/perdesaan di setiap kabupaten/kota dari hasil sensus penduduk 2010 (SP 2010). Sedangkan kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga adalah daftar rumah tangga hasil update daftar hasil SP 2010 dengan menggunakan Daftar VSEN12.P

2.3. RANCANGAN SAMPEL

Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2012 dilaksanakan setiap triwulanan, data yang dikumpulkan triwulanan selama setahun akan digunakan untuk memperkirakan (*estimasi*) sampai tingkat kabupaten/kota. Metode pengambilan sampel dilakukan dua tahap dimana; *Tahap pertama*, dari kerangka sampel blok sensus dipilih sejumlah blok sensus *secara Probability Proportional to Size (PPS)² – Linear Systematic Sampling* dengan size banyaknya rumah tangga hasil listing di setiap blok sensus hasil Sensus Penduduk 2010. *Tahap kedua*, dari sejumlah rumah tangga hasil update di setiap blok sensus terpilih dipilih sebanyak 10 rumah tangga secara *Linear Systematic Sampling*³.

² *Proportional Probability to Size (PPS)* adalah salah satu design pengambilan sampel, dimana probabilita setiap unit sampel ditentukan oleh besarnya size unit sampel tersebut. Dalam hal ini unit sampelnya blok sensus dengan size banyaknya rumah tangga tiap blok sensus. Semakin banyak rumah tangga dalam suatu blok sensus maka probabilita terpilihnya blok sensus tersebut sebagai sampel semakin besar

³ *Linear Systematic Sampling* adalah metode pengambilan sampel dengan menggunakan angka kelipatan tertentu setelah unit sampel diurutkan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini unit sampelnya adalah rumah tangga (dalam satu blok sensus) yang diurutkan berdasarkan kelompok pengeluaran rumah tangga. Dimaksudkan supaya yang sampel yang terpilih meliputi semua kelompok pengeluaran

2.4. METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data setiap rumah tangga terpilih dilakukan dengan wawancara langsung antara pencacah dengan responden. Keterangan tentang rumah tangga dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lainnya yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan. Sedangkan pertanyaan yang ditujukan untuk individu diusahakan individu bersangkutan yang menjadi responden.

2.5. METODE PENGHITUNGAN

Partisipasi Pendidikan Formal

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

$$\text{APS 7-12 tahun} = \frac{\text{Jml pddk yg masih sekolah usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100$$

Catatan: kelompok usia sekolah (7-12, 13-15 tahun, 16-18 dan 19-24 tahun)

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

$$\text{APK SD/MI} = \frac{\text{Jumlah pddk yg masih sekolah di SD/MI}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100$$

Catatan: APK SD/MI, APK SMP/MTs, APK SM/MA, atau APK PT

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

$$\text{APM SD/MI} = \frac{\text{Jumlah murid SD/MI usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100$$

Catatan:

Jenjang SD/MI usia 7-12 tahun, SMP/MTs: usia 13-15 tahun, SM/MA : usia 16 -18 tahun, dan Perguruan tinggi: usia 19-24 tahun

Untuk partisipasi Pendidikan Formal+Non formal jenjang :

- Sekolah Dasar (SD) : SD/MI + Paket A setara SD/MI
- Sekolah Menengah Pertama (SMP) : SMP/MTs+ Paket B setara SMP/MTs
- Sekolah Menengah : SM/MA + Paket C setara SM/MA

4. Buta Huruf

$$ABH \text{ 10 tahun ke atas} = \frac{\text{Jumlah pdtk umur 10 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis}}{\text{Jumlah penduduk umur 10 tahun ke atas}} \times 100$$

Catatan: Kelompok Umur : 10 tahun keatas, 15 tahun ke atas, 15-44 tahun, dan 45 tahun ke atas

2.6. PENGOLAHAN DATA

Pengolahan, dilakukan mulai dari pengolahan manual meliputi pengecekan awal atas kelengkapan isian daftar pertanyaan (pemeriksaan), pengelompokan (*batching*), pemberian kode (*coding*) serta penyuntingan (*editing*) terhadap isian yang tidak wajar. Selanjutnya tahap perekaman data (*data entry*), kompilasi data, pemeriksaan konsistensi antar isian dalam kuesioner (*validation*) sampai dengan tabulasi dilakukan dengan menggunakan komputer.



BAB III

KONSEP DAN DEFINISI

Untuk menghindari salah pengertian dalam membaca dan memahami data maka perlu dibuat batasan kerangka berpikir sehingga diperoleh kesamaan persepsi tentang angka yang disajikan. Beberapa konsep dan definisi yang perlu diperhatikan dalam publikasi ini adalah :

Sekolah adalah sekolah formal maupun non formal mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Pendidikan prasekolah (*play group* dan taman kanak-kanak), kursus-kursus (mengetik, komputer, bahasa dan sejenisnya), kursus kedinasan (Seskoad, Diklatpim IV, III, II, Lemhanas) dan kejar paket A, B, atau C sebagai sekolah nonformal.

Seseorang dikatakan *sedang/masih bersekolah* apabila ia terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan disuatu jenjang pendidikan formal maupun non formal. *Aktif mengikuti pendidikan* maksudnya bahwa ia secara fisik mengikuti pelajaran di kelas, termasuk yang tidak mengikuti pelajaran di kelas tetapi diperbolehkan mengikuti ujian.

Jenjang pendidikan dikelompokkan menjadi tiga yaitu;

1. *Jenjang pendidikan dasar* meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtida'iyah (MI) atau yang sederajat, serta Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau yang sederajat.
2. *Jenjang pendidikan menengah* meliputi Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) atau yang sederajat.

3. *Jenjang pendidikan tinggi* meliputi semua pendidikan yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan menengah, terbagi dalam dua jalur;

Program Gelar (Strata atau disebut juga Jalur Akademik) yaitu program yang menekankan pada pembentukan keahlian akademik mengenai penelitian dalam suatu bidang ilmu, teknologi atau seni yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi mencakup pendidikan sarjana muda (S0), sarjana/strata-1 (S1), strata-2 (S2) dan strata-3 (S3)

Program Non Gelar (Non Strata atau disebut juga Jalur Profesional) yaitu program yang menekankan pada pembentukan keahlian profesional, yaitu keahlian pada ketrampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni. Program ini pada umumnya adalah program pendidikan diploma, yang meliputi Diploma I (DI), Diploma II (DII), Diploma III (DIII)/setara dengan sarjana muda dan Diploma IV (DIV)/setara dengan sarjana.

Status pendidikan adalah keadaan seseorang/penduduk pada saat pencacahan, dibedakan menjadi;

1. *Tidak/belum pernah bersekolah* adalah penduduk yang tidak atau belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan.
2. *Masih bersekolah* adalah penduduk yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan disuatu jenjang pendidikan formal maupun non formal. Tidak termasuk penduduk yang mengikuti pendidikan di madrasah diniyah dan kursus-kursus.
3. *Tidak bersekolah lagi* adalah penduduk yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, tetapi pada saat

pencacahan yang bersangkutan tidak lagi terdaftar dan atau tidak aktif (lagi) mengikuti pendidikan.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan seseorang yang ditandai dengan lulus ujian akhir serta mendapatkan surat tanda tamat belajar atau ijazah.

Penduduk dikatakan *mampu baca tulis* jika dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu. Orang buta yang dapat membaca huruf *braille* digolongkan dapat membaca dan menulis. Orang yang dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaliknya, dianggap tidak dapat baca tulis.

<http://bali.bps.go.id>



BAB IV

PEMBAHASAN

Indikator merupakan suatu konsep sekaligus ukuran. Sebagai suatu konsep, indikator pendidikan merupakan besaran kuantitatif mengenai suatu konsep tertentu yang dapat digunakan untuk mengukur proses dan hasil pendidikan atau dampak dari suatu instrumen kebijakan pendidikan. Sebagai ukuran kuantitatif, indikator merupakan besaran dari suatu keadaan empiris dari suatu konsep atau gejala tertentu sebagai hasil pengolahan dari dua satuan data atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Indikator juga didefinisikan sebagai perbandingan antara dua atau lebih variabel sehingga dapat diinterpretasikan.

Dalam menyusun indikator pendidikan, indikator-indikator diklasifikasikan menurut bentuk pendidikan, yaitu (1) pendidikan umum, (2) pendidikan masyarakat dan (3) pendidikan kedinasan. Oleh karena publikasi ini sebagian besar sumber datanya berasal dari susenas, maka dalam ulasannya hanya mencoba menguraikan tentang pendidikan umum saja. Pendidikan umum karena maknanya kurang lebih sama dengan pendidikan formal maka indikator yang diidentifikasi berlaku untuk ;

1. Jenjang pendidikan dasar yang meliputi pendidikan Prasekolah, pendidikan Sekolah Dasar (termasuk Madrasah Ibtidaiyah, SDLB dan SD Terpadu).

2. Pendidikan menengah yang meliputi menengah pertama umum/Madrasah Tsanawiyah maupun kejuruan dan menengah lanjutan umum/Madrasah Aliyah maupun kejuruan.
3. Pendidikan tinggi yang meliputi Universitas, Institut, Sekolah tinggi maupun Akademi.

Gambaran tentang pendidikan di Provinsi Bali dapat diukur dengan beberapa indikator pendidikan. Ada empat indikator utama yang sering digunakan adalah pertama, Angka Partisipasi Sekolah bagi penduduk usia sekolah 7-18 tahun (SD hingga SMA), sebagaimana harapan pemerintah bahwa penduduk usia tersebut adalah penduduk yang dijadikan sasaran utama pembangunan bidang pendidikan. Kedua, Angka Buta Huruf (ketidakmampuan baca tulis penduduk) dari penduduk usia 15 tahun atau lebih, dimana diharapkan pada kelompok umur tersebut penduduk sudah dapat membaca dan menulis. Ketiga, Angka anak putus sekolah dengan mencoba melihat gambaran anak yang berada pada kelompok usia pendidikan 7-18 tahun akan tetapi kondisi mereka dalam keadaan tidak aktif bersekolah. Dan keempat, adalah angka Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan berupa persentase penduduk yang minimal tamat SMA, karena diharapkan dengan lulus SMA, penduduk sudah memiliki kualitas yang cukup memadai untuk bersaing di pasar kerja. Ketiga indikator utama bidang pendidikan di Provinsi Bali tahun 2012 seperti uraian berikut :

4.1. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH.

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat menunjukkan Proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan.

Penghitungan APS tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA, Umur penduduk dibagi ke dalam tiga kelompok dimana Kelompok pertama umur 7-12 tahun untuk tingkat pendidikan SD, kelompok kedua umur 13-15 tahun untuk tingkat pendidikan SMP, dan kelompok ketiga umur 16-18 tahun untuk tingkat pendidikan SMA. Kajian tentang Angka Partisipasi Prasekolah/Sekolah digambarkan dalam ulasan berikut :

4.1.1. Partisipasi Siswa pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Berdasarkan hasil penelitian sekitar 50 Persen kapabilitaas kecerdasan orang dewasa telah terjadi ketika anak berumur 4 tahun, 80 persen telah terjadi perkembangan yang pesat tentang jaringan otak ketika anak berumur 8 tahun dan mencapai puncaknya ketika anak berumur 18 tahun, dan setelah itu walaupun dilakukan perbaikan nutrisi tidak akan berpengaruh terhadap perkembangan kognitif.

Memang Pendidikan Anak Usia Dini bukanlah satu-satunya yang paling penting bagi kesuksesan seorang anak di masa depan. Namun, hal tersebut merupakan satu diantara banyak hal penting yang harus diperhatikan. Karena kematangan pendidikan sejak usia dini sangat berpengaruh bagi perkembangan anak dari berbagai aspek kecerdasan. Selain itu dengan

Pendidikan Anak Usia Dini, anak akan menjadi lebih matang dan siap dalam menghadapi dunia sekolah (Deni Ardiansyah, Desember 2012)

Kegiatan pra sekolah meliputi pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), RA, BA, Kelompok Bermain, dan Tempat Penitipan Anak yang mempunyai program pengembangan anak. Bila syarat-syarat motorik ini telah dirangsang dengan berbagai jenis permainan maka dia akan tumbuh dan berkembang menjadi jutaan sel motorik yang akan menjadi cikal bakal dari kecerdasan anak di masa yang akan datang. Ketika anak memasuki pendidikan usia dini, yang harus dilatih adalah bagaimana cara bermain yang benar, bernyanyi dan berkreasi sesuai dengan kekuatan fisik anak. Jadi ketika anak memasuki dunia pendidikan usia dini (setingkat taman kanak-kanak, *play group*, kelompok bermain, tempat penitipan anak/TPA) maka anak bukanlah harus belajar membaca, menulis apalagi berhitung (Hilary Clinton -1998).

Hasil pengolahan data Susenas tahun 2012, menunjukkan bahwa rata-rata angka partisipasi PAUD di Provinsi Bali mencapai 50,07 persen. Angka partisipasi PAUD di Bali tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan, hal ini terjadi karena perhatian pemprov Bali yang cukup serius terhadap anak usia dini di Bali. Dari angka tersebut dapat dikatakan bahwa dari 100 penduduk usia 4-6 tahun, sebanyak 50 orang yang sudah mengikuti pendidikan, ini berarti pemahaman orang tua sudah mulai berkembang akan pentingnya pendidikan pada anak.

Dilihat dari paritas gender (PG) dimana PG merupakan selisih antara penduduk perempuan terhadap laki-laki, terlihat bahwa nilai PG Bali tahun 2012 sebesar 2,03 persen, ini menandakan penduduk laki-laki umur 4-6 tahun lebih banyak mengikuti pendidikan dibandingkan penduduk perempuan diusia yang sama. Indeks paritas gender (IPG) menunjukkan nilai dibawah satu

persen (0,96 persen) yang berarti kebanyakan anak perempuan dibandingkan laki-laki yang sekolah PAUD pada usia tersebut.

Tabel 1: Persentase Penduduk Usia 4-6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Sekolah dan jenis kelamin, Provinsi Bali 2012

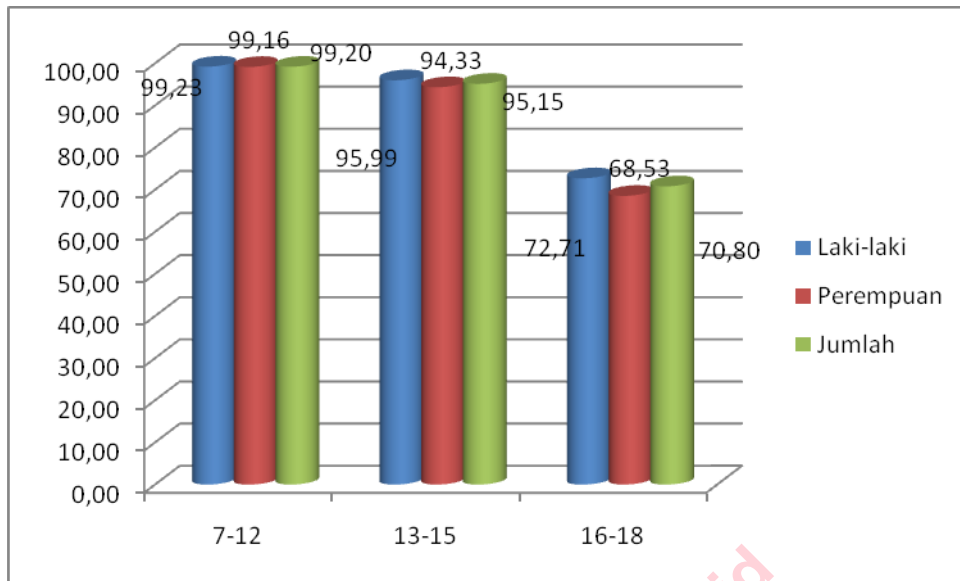
Kabupaten/Kota	Ya, pernah/sedang Sekolah			PG	IPG
	Laki	Prp	Laki+Prp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Jembrana	30,24	45,85	38,00	-15,61	1,52
2. Tabanan	62,00	58,67	60,25	3,33	0,95
3. Badung	62,19	65,02	63,43	-2,83	1,05
4. Gianyar	52,97	68,03	60,11	-15,06	1,28
5. Klungkung	64,49	58,16	61,33	6,33	0,90
6. Bangli	28,49	33,07	30,72	-4,58	1,16
7. Karangasem	31,82	27,41	29,74	4,42	0,86
8. Buleleng	30,51	27,90	29,19	2,61	0,91
9. Denpasar	72,38	56,70	64,78	15,68	0,78
BALI	51,05	49,02	50,07	2,03	0,96

Sumber : BPS, Susenas 2012

4.1.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu, maka dilakukan penghitungan Angka Partisipasi Sekolah (APS), dimana APS merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai.

Gambar 1 : Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun Menurut Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2012



Sumber : BPS, Susenas 2012.

Pada Gambar 1 terlihat bahwa APS SD mendekati 100 persen, artinya bahwa hampir semua anak usia 7-12 tahun sedang mengikuti pendidikan Sekolah Dasar, sementara pada tingkat pendidikan SMP terlihat baru 95,15 persen penduduk usia 13-15 tahun yang sedang mengikuti pendidikan SMP, dan sisanya sebesar 4,85 persen sedang mengikuti pendidikan lain seperti SMA atau mungkin sedang tidak mengikuti pendidikan. Pada pendidikan SMA terlihat angka APS baru mencapai angka 70,80 persen, dimana angka tersebut menunjukkan bahwa baru 70,80 persen penduduk usia 16-18 tahun yang mengikuti pendidikan, sedangkan sisanya sebesar 29,2 persen belum/tidak mengenyam pendidikan SMA. Sedangkan jika dilihat menurut jenis kelamin, dapat dikatakan tidak ada perbedaan yang sangat mencolok antara laki-laki dan perempuan, berarti pandangan bahwa laki-laki lebih diprioritaskan untuk mendapatkan pendidikan sudah semakin terkikis.

Mengkaji lebih dalam tentang APS, Tabel 2 dibawah menyajikan angka partisipasi sekolah (APS) menurut kelompok usia sekolah 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang terjadi di kabupaten/kota se-Bali.

Tabel 2 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2012.

Kabupaten/Kota	APS 7 - 12 th			APS 13 - 15 th			APS 16 - 18 th		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Jembrana	97,75	100,00	98,89	95,82	97,88	96,93	79,65	68,77	74,79
2. Tabanan	100,00	100,00	100,00	96,45	86,63	91,92	61,94	63,93	62,86
3. Badung	99,36	99,20	99,29	94,85	95,49	95,23	89,23	76,81	83,27
4. Gianyar	99,39	98,71	99,07	97,93	97,18	97,54	89,64	79,50	84,55
5. Klungkung	100,00	100,00	100,00	97,75	89,18	93,84	69,59	73,55	71,29
6. Bangli	100,00	99,14	99,61	95,22	84,32	89,86	47,46	33,96	41,99
7. Karangasem	99,17	98,54	98,86	97,82	93,91	95,92	53,46	51,00	52,45
8. Buleleng	97,99	98,06	98,02	95,67	96,51	96,07	73,72	65,69	70,24
9. Denpasar	100,00	100,00	100,00	93,77	96,41	95,13	73,08	73,69	73,38
BALI 2012	99,23	99,16	99,20	95,99	94,33	95,15	72,71	68,53	70,80
2011	98,56	98,32	98,45	92,02	92,46	92,22	72,34	65,41	68,91

Sumber : BPS, Susenas 2012.

A. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun di Provinsi Bali mengalami peningkatan jika disbanding dengan tahun sebelumnya. Yaitu 98,45 persen di tahun 2011 menjadi 99,20 persen di tahun 2012 atau meningkat sekitar 0,75 poin. Angka APS pada kelompok usia ini tertinggi di Kabupaten Tabanan, Klungkung, dan Kota Denpasar yaitu sebesar 100 persen. Sementara APS terendah terdapat di Kabupaten Buleleng yaitu sebesar 98,02 persen. Perbedaan angka antara Kabupaten/Kota yang tidak terlalu jauh pada APS usia 7-12 Tahun ini menunjukkan bahwa program wajib belajar 9 tahun sebagai upaya

untuk pengentasan buta aksara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sudah cukup berhasil.

B. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun capaiannya tidak secemerlang APS pada tingkat SD meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, angka APS pada kelompok usia ini tertinggi terlihat pada Kabupaten Gianyar sebesar 97,54 persen, dan terendah pada Kabupaten Tabanan sebesar 91,92 persen. Berbeda dari tahun sebelumnya dimana posisi terendah adalah Kabupaten Buleleng, kenaikan angka APS pada kelompok umur ini terjadi pada semua Kabupaten/Kota yang ada di Bali, kenaikan angka ini juga menunjukkan keseriusan Pemerintah daerah dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Dilihat dari sisi gender tidak ada perbedaan yang mencolok antara laki-laki dan perempuan, disini juga menunjukkan bahwa perhatian orang tua dari sisi pendidikan sama terhadap anak laki-laki maupun perempuan.

C. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16-18 tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16-18 tahun juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 9,89 poin, peningkatan ini terjadi di semua Kabupaten/Kota. Angka APS pada kelompok umur ini tertinggi pada Kabupaten Gianyar sebesar 84,25 persen dan terendah pada Kabupaten Karangasem sebesar 52,45 persen. Meskipun perhatian pemerintah daerah sudah cukup serius pada bidang pendidikan, namun pada kelompok umur ini angka yang dicapai masih dikisaran 70 persen, hal ini mengisyaratkan perlunya peningkatan upaya lebih lanjut yang

harus dilakukan Pemerintah Daerah setempat untuk meningkatkan hasil ditahun-tahun kedepannya.

4.1.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP dan SMA

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu berapapun umurnya terhadap jumlah penduduk kelompok umur tertentu. Indikator APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Selain itu APK juga merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk umur sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Jika nilai APK menunjukkan angka mendekati atau lebih dari 100 persen berarti ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini menggambarkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih daripada target yang sesungguhnya.

Dari hasil Susenas 2012 terlihat angkanya APK disemua Kabupaten/Kota yang ada dibali sebagai berikut:

Tabel 3 : Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Pendidikan Di Provinsi Bali Tahun 2012.

Kabupaten/Kota	APK SD			APK SMP			APK SMA		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)
1. Jembrana	104,75	100,49	102,60	78,14	75,44	76,68	107,07	127,46	116,18
2. Tabanan	101,21	87,93	94,75	91,54	121,05	105,18	82,35	70,41	76,85
3. Badung	96,22	99,56	97,71	111,34	83,49	94,90	92,57	118,82	105,18
4. Gianyar	97,37	94,08	95,85	103,04	105,45	104,28	93,08	94,15	93,62
5. Klungkung	108,75	107,08	107,87	76,75	73,27	75,16	101,79	101,14	101,51
6. Bangli	105,99	95,25	101,15	86,92	91,90	89,37	58,99	54,16	57,03
7. Karangasem	109,39	100,31	104,89	96,64	93,67	95,19	59,48	68,39	63,12
8. Buleleng	104,76	95,40	100,17	78,22	104,58	90,81	96,82	83,31	90,96
9. Denpasar	96,60	93,85	95,27	96,95	119,11	108,34	82,17	71,48	77,01
BALI 2012	101,42	96,11	98,87	91,92	99,43	95,73	86,15	86,85	86,47
2011	101,28	98,45	99,95	85,99	98,53	91,71	90,64	77,91	84,33

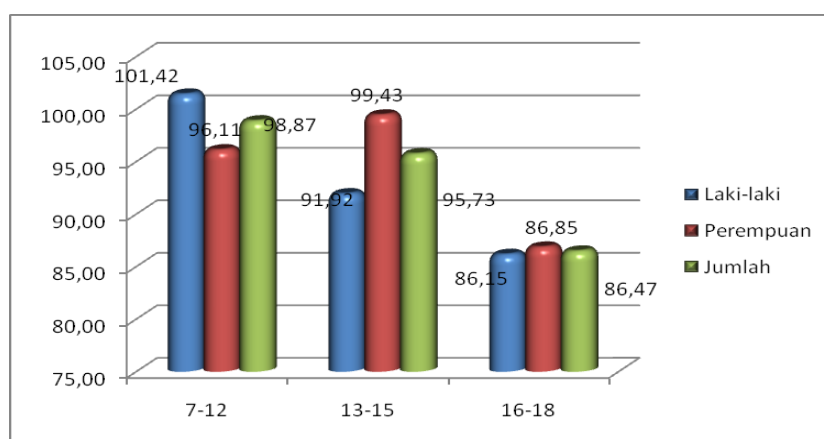
Sumber: BPS, Susenas 2012.

Dari tabel diatas terlihat bahwa angka APK SD di Provinsi Bali menunjukkan angka sebesar 98,87 persen yang berarti bahwa hanya 99 persen anak umur 7 sampai dengan 12 tahun duduk dibangku Sekolah Dasar, sisanya bisa diasumsikan mereka sedang menduduki jenjang pendidikan di luar Sekolah Dasar. Untuk wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali, angka APK tertinggi ada di Kabupaten Klungkung yaitu sebesar 107,87 persen sedangkan terendah ada di Kabupaten Tabanan (94,75 persen).

Baik APK SMP maupun SMA terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. APK SMP tahun 2011 sebesar 91,71 persen meningkat sekitar 4,02 poin di banding tahun 2012. Sementara APK SMA meningkat 2,14 poin dari 84,33 persen di tahun 2011 menjadi 86,47 persen.

Tingginya angka APK pada jenjang pendidikan SD dan SMP menunjukkan bahwa masih banyak penduduk yang berminat untuk menuntaskan pendidikan dasar 9 tahunnya mengingat bahwa APK tidak memperhatikan umur dalam penghitungannya.

Gambar 2 : APK Pendidikan SD, SMP, dan SMA, berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Bali Tahun 2012



Sumber : BPS, Susenas 2012.

4.1.4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Selain APS dan APK diatas masih ada lagi penghitungan Angka Partisipasi sekolah yang lain yaitu Angka Partisipasi Murni (APM). Yang merupakan terjemahan dari *Net Enrolment Ratio* (NER). APM merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut.

Tabel 4: Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, dan SMA Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2012

Kabupaten/Kota	APM SD			APM SMP			APM SMA			
	L	P	T	L	P	T	L	P	T	
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	
1. Jembrana	92,26	92,61	92,44	67,48	62,93	65,03	79,65	68,77	74,79	
2. Tabanan	93,20	81,50	87,50	73,40	76,25	74,72	53,43	58,76	55,88	
3. Badung	89,86	90,11	89,97	81,36	65,60	72,05	77,60	69,89	73,89	
4. Gianyar	93,65	88,46	91,24	83,04	82,50	82,76	73,11	69,19	71,14	
5. Klungkung	95,60	96,51	96,08	70,44	66,61	68,69	64,40	73,55	68,33	
6. Bangli	98,04	88,54	93,75	82,38	68,29	75,45	45,77	29,59	39,21	
7. Karangasem	95,89	92,73	94,32	86,19	75,29	80,88	49,38	47,14	48,46	
8. Buleleng	95,33	86,90	91,19	68,19	76,26	72,05	65,19	59,37	62,67	
9. Denpasar	91,40	86,98	89,27	71,20	84,74	78,16	66,26	61,13	63,78	
BALI	2012	93,42	88,51	91,06	75,53	74,62	75,07	65,01	61,23	63,28
	2011	91,57	89,06	90,39	65,99	72,94	69,16	63,56	57,47	60,54

Sumber : BPS, Susenas 2012.

Angka Partisipasi Murni (APM) di Bali tahun 2012 mengalami peningkatan, baik dari kelompok pendidikan SD, SMP maupun SMA. Peningkatan yang terjadi menunjukkan bahwa proporsi anak yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yang harus diikuti terus bertambah. Manfaat dari angka ini adalah untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Selain itu angka APM juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat

memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

A. Angka Partisipasi Murni (APM) SD

APM SD digunakan untuk mengetahui partisipasi sekolah anak SD ditinjau dari ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikan SD. Pada tabel 4 terlihat jelas perbedaan angka APM Bali dari tahun 2011 antara laki-laki dan perempuan. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai APM ini lebih disebabkan oleh banyak sedikitnya jumlah penduduk sekolah baik laki-laki maupun perempuan pada kelompok umur 7-12 yang menduduki jenjang pendidikan tersebut. APM SD tertinggi terdapat di Kabupaten Karangasem dengan angka sebesar 94,32 persen sedangkan yang terendah ada di Kabupaten Tabanan sebesar 87,50 persen.

B. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP di Bali mengalami peningkatan dari Tahun 2011, peningkatan terjadi hampir disemua kabupaten/kota. Angka APM tertinggi pada kelompok umur ini berada di Kabupaten Gianyar yaitu sebesar 82,76 persen, naik 8,45 poin dari tahun sebelumnya, posisi tertinggi ini juga disandang oleh Kabupaten Gianyar pada tahun sebelumnya. Angka terendah berada pada Kabupaten Jembrana sebesar 65,03 persen naik 1,04 poin dari tahun sebelumnya, posisi terendah ini juga diduduki Kabupaten Jembrana di Tahun 2011.

Jika dilihat dari sisi gender, APM SMP tidak menunjukkan perbedaan jauh antara laki-laki dan perempuan, dengan kata lain perhatian dan wawasan masyarakat sudah mulai terbuka tentang pendidikan. Perbedaan gender laki-laki ataupun perempuan sudah tidak lagi menjadi halangan dalam menuntut pendidikan, artinya kesempatan bersekolah sudah terbuka lebar bagi siapapun.

Hal ini menunjukkan meskipun Bali sangat kental prinsip patrilinealismsenya, namun hal tersebut tidak berlaku pada dunia pendidikan.

C. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA Provinsi Bali di Tahun 2012 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana di Tahun 2011 sebesar 60,54 persen menjadi 63,28 persen di Tahun 2012, peningkatan ini terjadi hampir disemua kabupaten/kota. Angka APM SMA tertinggi sebesar 74,79 persen di Kabupaten Jembrana, naik 26,30 persen dari tahun sebelumnya.

Angka APM SMA terendah sebesar 39,21 persen di Kabupaten Bangli, rendahnya angka ini disinyalir karena pergeseran kelompok usia sekolah yang terjadi di Kabupaten Bangli, hal ini dapat dijelaskan dengan bertambahnya angka APM kelompok usia perguruan tinggi sebesar 1,37 poin. Pergeseran ini menyebabkan turunnya angka APM di kelompok umur SMA dan meningkatnya angka APM di kelompok umur perguruan tinggi.

Penerapan penghitungan APM untuk pendidikan tinggi sebenarnya tidak begitu relevan, hal ini terkendala dalam menentukan kelompok umur yang tepat karena banyaknya variasi dalam lamanya program-program di tingkat pendidikan ini.

4.2. ANGKA BUTA HURUF.

Angka Buta Huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis baik Huruf Latin maupun huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Kemampuan membaca yang dimaksud di sini tidak dituntut harus bisa mengerti apa yang dibaca/ditulisnya. Manfaat angka ini adalah untuk melihat pencapaian

indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan.

Negara Indonesia sendiri telah ikut serta menandatangani MDGs (*Milenium Development Goals*) yang di luncurkan oleh *United Nation* (PBB), bahwa pada tahun 2015 diharapkan buta aksara di kalangan marginal telah dapat dikurangi minimal menjadi 50 persen. Sebagai bagian dari dunia global, sudah tentu Bali juga wajib mencapai target tersebut. Pada tingkat makro, ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah tingkat melek huruf yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis.

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

Angka melek huruf berbanding terbalik dengan angka buta huruf, yaitu persentase penduduk 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis baik huruf latin dan atau huruf lainnya, semakin tinggi angka melek huruf suatu wilayah berarti angka buta hurufnya akan semakin rendah. Tahun 2012 tercatat penduduk Bali yang berusia 15 tahun ke atas dan telah memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis mencapai 90,17 persen, mengalami peningkatan sebesar 1 poin dibandingkan tahun 2011 yang nilainya sebesar 89,17 persen. Dengan kata lain, kedepan Pemerintah Provinsi Bali mempunyai kewajiban untuk menuntaskan buta aksara pada penduduk usia 15 tahun ke atas sekitar 9,83 persen.

Salah satu usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis penduduk adalah melalui program kejar

paket A, paket B dan program keaksaraan fungsional. Melalui program ini diharapkan penduduk yang tidak pernah sekolah mampu membaca dan menulis huruf latin termasuk juga mampu berbahasa indonesia. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk memperoleh tambahan pengetahuan melalui media cetak dan elektronik. Dari data Susenas 2012 terlihat bahwa 9,83 persen penduduk 15 tahun ke atas di Bali masih buta huruf, turun dari tahun 2011 sebesar 1,00 poin. Gambar 6 menyajikan potret penduduk usia 15 tahun ke atas di Bali yang buta huruf menurut jenis kelamin :

Gambar 3 : Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas Yang Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2012



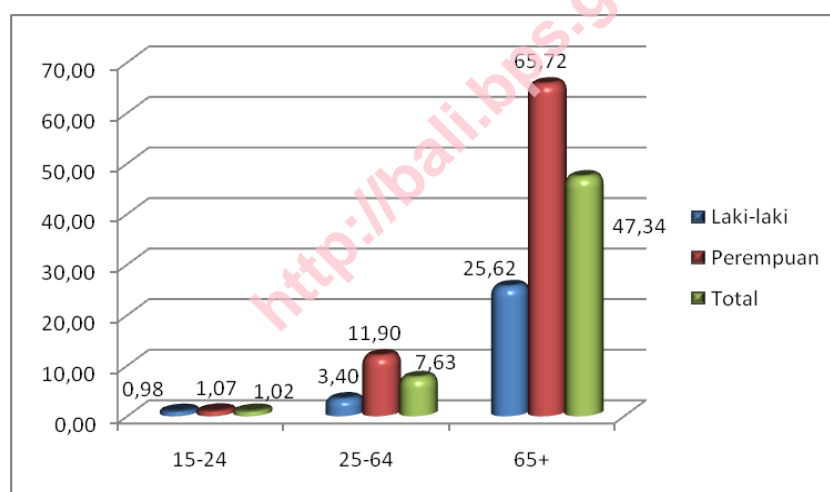
Sumber : BPS, Susenas 2012.

Bila dilihat menurut gender, buta huruf kaum perempuan lebih tinggi dari kaum lelaki. Angka buta huruf perempuan sebesar 14.97 persen sedikit mengalami penurunan sebesar 1,20 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka buta huruf perempuan berada jauh di atas laki-laki yang mencapai 4,70 persen menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,70 poin. Keadaan ini perlu diwaspadai dan menjadi kajian serius untuk kemudian secara tegas harus diimplementasikan dalam kegiatan pengarusutamaan gender (PUG) di Bali. Upaya pemberantasan buta huruf melalui kursus/pelatihan keaksaraan fungsional atau program kejar paket A, paket B yang mengarah kepada tujuan penuntasan buta aksara harus lebih

ditingkatkan sehingga upaya mewujudkan komitmen MDG'S dapat terwujud tuntas di tahun 2015.

Guna memperjelas kajian di atas, perlu dilakukan kajian yang spesifik mengarah pada angka buta huruf menurut kelompok umur. Dengan mengetahui spesifikasi angka buta huruf di masing-masing kelompok umur diharapkan kebijakan program pembangunan khususnya dalam pemberantasan buta huruf dapat diarahkan pada sasaran yang lebih efektif dan terarah. Gambar dibawah ini menyajikan Angka Buta Aksara menurut kelompok remaja (15-24 tahun), kelompok dewasa (25-64 tahun) dan kelompok lansia (65 tahun ke atas), di Provinsi Bali tahun 2012 sebagai berikut :

Gambar 4 : Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2012



Sumber : BPS, Susenas 2012.

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran buta aksara pada penduduk 15 tahun ke atas sebagian besar berada pada kelompok umur 65 tahun keatas atau pada kelompok lansia sebesar 47,34 persen dari 47,17 persen di tahun 2011, sisanya masing-masing tersebar pada kelompok umur 25-64 tahun atau kelompok dewasa sebesar 7,63 persen dari 8,80 persen di tahun 2011 dan pada kelompok umur 15-24 tahun atau kelompok remaja sebesar 1,02 persen dari

0,36 persen di Tahun 2011. Dilihat sisi gender, penduduk buta aksara kebanyakan terjadi pada kelompok perempuan seperti yang ditampilkan pada kelompok umur lansia, 25-64 tahun dan kelompok usia 15-24 tahun, pada semua kelompok umur tersebut jenis kelamin perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki, meski sudah dilakukan program pengentasan namun wanita masih tetap tinggi, ini terjadi karena kebanyakan perempuan di Desa sibuk dengan urusan rumah tangga sehingga waktunya menjadi terbatas untuk mengikuti pendidikan.

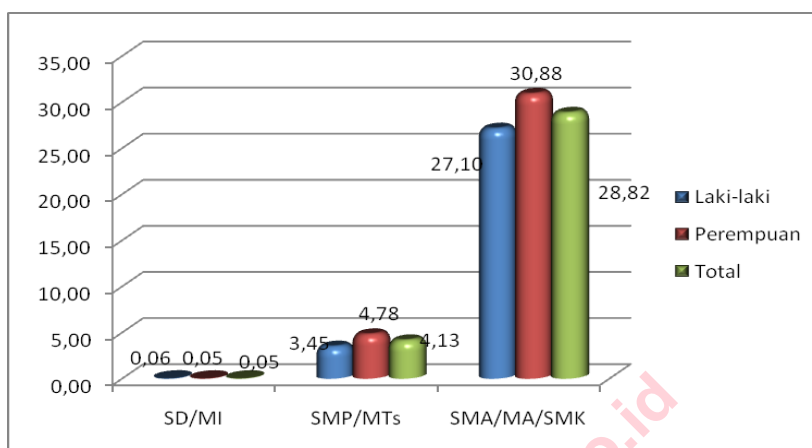
4.3. ANGKA ANAK PUTUS SEKOLAH.

Angka putus sekolah yang mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Penyebab putus sekolah antara lain karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, keadaan geografis yang kurang menguntungkan, kondisi ekonomi orang tua yang miskin. Kemiskinan seringkali menjadi alasan bagi siswa sekolah untuk tidak melanjutkan sekolah, karena mereka diharapkan membantu mencari nafkah untuk keluarganya, dan anggapan lebih baik bekerja dengan mendapatkan uang, disamping anggapan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar biaya yang diperlukan, sementara masyarakat miskin dan rumah tangga miskin tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk biaya pendidikan. Hal ini dapat saja merubah corak permasalahan pekerja anak suatu daerah. Angka putus sekolah dapat digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur, serta sekaligus gambaran kemampuan ekonomi orangtua.

Pada bahasan ini perkiraan jumlah putus sekolah menggunakan pendekatan kelompok penduduk berumur 7-18 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi termasuk penduduk yang tamat SD, SMP dan SMA, tapi tidak melanjutkan pendidikannya ke

jenjang yang lebih tinggi. Karena usia ini merupakan usia yang ideal untuk menyelesaikan pendidikannya.

Gambar 5 : Persentase Penduduk Putus Sekolah, Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Bali, Tahun 2012



Sumber: BPS, Susenas 2012

Dari grafik diatas dapat dikatakan bahwa penduduk yang putus sekolah kebanyakan pada anak jenjang pendidikan SMA, hal ini terjadi karena dimasyarakat ada pemahaman dengan pendidikan SMP saja sudah cukup dan sudah layak bekerja, disamping itu kemungkinan juga karena faktor ekonomi keluarga yang tidak bisa menyekolahkan karena biaya pendidikan usia SMA cukup tinggi.

Dilihat dari sisi gender, pada grafik diatas terlihat pada ketiga jenjang pendidikan tersebut angka putus sekolahnya didominasi oleh perempuan, kejadian ini tidak jauh berbeda dengan angka buta huruf di Tahun 2012. Pada dasarnya permasalahan pendidikan terjadi didaerah pedesaan, dimana pendidikan didaerah pedesaan lebih mementingkan gender, hal ini terjadi bukan semata-mata karena Bali menganut sistem patenalistik, akan tetapi lebih kepada waktu luang yang dimiliki kaum perempuan lebih banyak untuk mengurus rumah tangga.

4.4. PENDUDUK YANG TIDAK BERSEKOLAH LAGI

Sebagaimana tersirat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, Indonesia mempunyai cita-cita luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita luhur ini diimplementasikan kedalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan, dengan melaksanakan berbagai program kearah tersebut. Salah satu upaya yang kini sedang dilakukan adalah dengan melaksanakan program pembangunan pendidikan untuk semua (*Education for All/EFA*). Program EFA diarahkan pada upaya-upaya memberikan pendidikan secara terus menerus kepada semua penduduk usia 7 hingga 18 tahun sehingga diharapkan tidak ada penduduk di usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah.

Dari hasil susenas 2012 tercatat masih ada penduduk berusia 7-18 tahun yang tidak bersekolah sekitar 6,90 persen menurun dari tahun sebelumnya sebesar 9,02 persen, dan kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Tabel dibawah memperlihatkan bahwa perempuan usia 7-18 tahun masih ada yang tidak bersekolah sekitar 7,19 persen menurun dari tahun sebelumnya sebesar 10,04 poin. Pada usia yang sama laki-laki pada yang tidak bersekolah tercatat sebesar 6,63 persen, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 8,11 poin.

Dilihat dari sebaran wilayahnya tergambar bahwa daerah pedesaan masih lebih tinggi penduduk yang tidak bersekolah lagi dibandingkan daerah perkotaan, dari tabel berikut terlihat didaerah pedesaan persentase penduduk yang tidak pernah/belum sekolah dan tidak bersekolah lagi tercatat sebesar 6,46 persen dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 6,11 persen dan perempuan sebesar 6,84 persen. Di perkotaan tercatat sedikit lebih tinggi dibandingkan yang di pedesaan yaitu sebesar 9,31 persen dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 8,87 persen dan perempuan sebanyak 9,78 persen, tingginya angka

tersebut disebabkan oleh tingginya angka tidak bersekolah lagi di daerah perkotaan.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2012

Partisipasi Sekolah	Pedesaan			Perkotaan			Perkotaan + Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Tidak/Belum pernah sekolah	0,64	0,88	0,76	0,49	0,78	0,63	0,58	0,84	0,71
1. Masih sekolah	93,89	93,16	93,54	91,13	90,22	90,69	92,79	91,97	92,40
3. Tidak bersekolah Lagi	5,47	5,96	5,70	8,37	9,00	8,68	6,63	7,19	6,90
4. Jumlah 1 dan 3	6,11	6,84	6,46	8,87	9,78	9,31	7,21	8,03	7,60

Sumber : BPS, Susenas 2012.

Ada beberapa alasan yang diduga sebagai penyebab tidak dapat atau belum memperoleh kesempatan pendidikan diantaranya adalah karena tidak ada biaya, mencari nafkah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, mengurus rumah tangga/menikah, lokasi sekolah jauh, atau alasan lain yang menyebabkan mereka tidak bisa memperoleh/ melanjutkan pendidikan. Berikut beberapa alasan penduduk yang tidak bersekolah:

Tabel 6. Persentase penduduk 7-18 Tahun Menurut Alasan Tidak Bersekolah dan Jenis Kelamin di Provinsi Bali Tahun 2012

Alasan tdk/blm pernah sekolah/tdk bersekolah lagi	Jenis Kelamin		
	Laki	Prp	Laki + Prp
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tidak ada biaya	31,74	49,26	40,66
2. Bekerja/mencari nafkah	21,12	16,87	18,96
3. Menikah/mengurus rt	1,76	6,26	4,05
4. Merasa pendidikan cukup	4,43	2,39	3,39
5. Belum Cukup Umur	0,00	0,00	0,00
6. Malu karena ekonomi	0,52	0,00	0,26
7. Sekolah jauh	0,00	1,10	0,56
8. Cacat	4,78	2,23	3,48
9. Menunggu pengumuman	1,46	3,64	2,57
10. Tidak diterima	0,00	0,17	0,09
11. Lainnya	34,19	18,08	25,99
Total Bali	100	100	100

Sumber : BPS, Susenas 2012.

Dari 11 kelompok alasan responden dapat mengenyam pendidikan seperti yang ditabelkan diatas, terlihat bahwa alasan tidak ada biaya merupakan alasan dengan persentase tertinggi dari tahun ke tahun, alasan tersebut sebesar 40,66 persen, dilihat dari sudut pandang gender dapat dikatakan persentase penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih besar dengan penyebab tidak ada biaya dibandingkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki. Bekerja/mencari nafkah menjadi urutan kedua jawaban terbanyak setelah jawaban tidak ada biaya, terlihat pada jenis kelamin laki-laki persentasenya lebih tinggi dari perempuan, dari data diatas dapat dikatakan bahwa kecendrungan anak laki-laki lebih memilih mencari kerja dari pada sekolah.

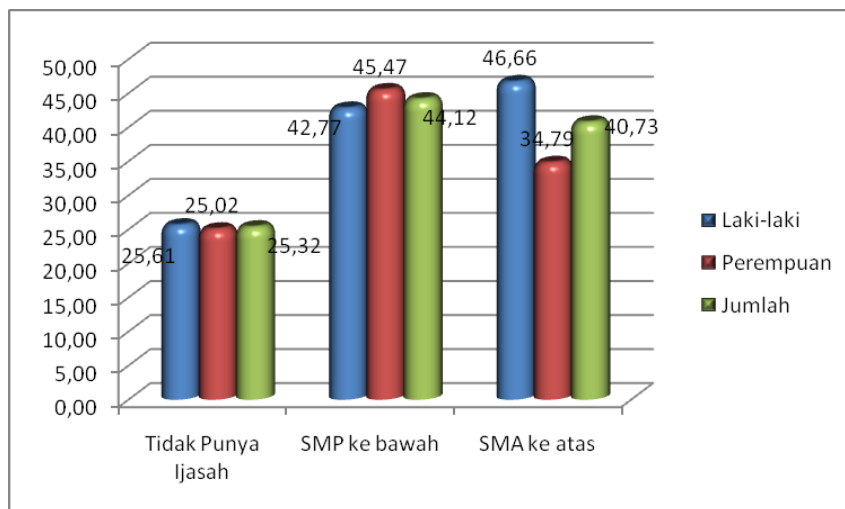
4.5. TINGKAT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN.

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk dapat menjadi salah satu indikator dari tingkat kemampuan SDM. Tahun 2012 tingkat

pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk di Propinsi Bali mengalami peningkatan yang dicirikan dengan berkurangnya persentase penduduk yang berpendidikan rendah dan sebaliknya persentase penduduk yang berpendidikan tinggi meningkat. Persentase penduduk dengan tingkat pendidikan tertinggi yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD, mengalami penurunan. Sedangkan penduduk dengan tingkat pendidikan tamat SD, SMP, SMA, dan tamat akademi/perguruan tinggi, persentasenya mengalami peningkatan

Dari sudut pandang gender, perlu diperhatikan bahwa masih ada tendensi diskriminatif terhadap kesempatan pendidikan bagi kaum perempuan. Ketimpangan pemerataan tingkat pendidikan yang ditamatkan perempuan hanya unggul pada tingkat pendidikan SMP ke bawah saja. Ditingkat SMA ke atas tingkat pendidikan kaum perempuan berada di bawah laki-laki. Pola semacam ini terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 6 : Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan dan jenis kelamin, Provinsi Bali Tahun 2012.



Sumber : BPS, Susenas 2011

Pada grafik diatas terlihat bahwa penduduk 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu tidak punya ijazah, SMP ke bawah, dan SMA ke atas. Dilihat dari sisi gender penduduk laki-laki pada kelompok SMA ke atas lebih tinggi dari yang perempuan, namun pada SMP ke bawah malah sebaliknya yaitu penduduk perempuan lebih tinggi persentasenya dari penduduk laki-laki meskipun tidak terlalu jauh.

<http://bali.bps.go.id>



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari hasil kajian data susenas 2012 di atas, dan hasil analisis dengan menggunakan beberapa indikator pendidikan yang ada, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting untuk menjadi bahan evaluasi pembangunan di bidang pendidikan khususnya di Provinsi Bali :

1. Partisipasi sekolah anak usia dini (0-6 tahun) baru mencapai 50,07 persen. Mengingat betapa pentingnya upaya peningkatan kualitas manusia sejak usia dini, maka program ini perlu dipacu khususnya bagi Kabupaten Buleleng, Karangasem, Bangli, dan Jembran, dimana capaian angka partisipasinya masih berada dibawah rata-rata Bali.
2. Dari hasil perhitungan angka partisipasi sekolah baik APS maupun APM di ketiga jenjang pendidikan, (SD, SMP, dan SMA) Provinsi Bali, ada tendensi bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, makin kecil angka partisipasinya. Semakin rendahnya angka partisipasi tersebut lebih banyak disebabkan oleh menurunnya partisipasi sekolah dari penduduk perempuan. Diduga masih ada diskriminasi gender, dimana laki-laki masih dipandang sebagai figur utama pada program pendidikan 7 hingga 18 tahun.
3. Hingga tahun 2012 di Bali masih terdapat 9,83 persen penduduk usia 15 tahun keatas yang belum melek huruf. Sebaran penduduk buta huruf di

Bali sebagian besar ada di Kabupaten Karangasem, Klungkung, Buleleng dan Bangli.

4. Angka Anak Putus sekolah di Bali masih terjadi di semua jenjang pendidikan. Angka anak putus sekolah di Bali memiliki pola semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan/kelompok usia sekolah.
5. Di Bali masih ada sekitar 6,90 persen dari penduduk berusia 7-18 tahun yang tidak bersekolah dan kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Ada tiga alasan utama yang dikemukakan oleh penduduk usia 7-18 tahun sehingga menyebabkan mereka tidak bersekolah. Sebesar 40,66 persen alasan yang dikemukakan adalah karena tidak ada biaya. Alasan ini paling banyak dikemukakan oleh penduduk baik di laki-laki maupun perempuan.
6. Secara normatif kualitas penduduk di Bali relatif baik jika penduduk umur 15 tahun ke atas yang berpendidikan minimal tamat SMP mendekati 100 persen. Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang berpendidikan minimal tamat SMP masih kurang dari separuhnya (hanya 44,12 persen). Hal ini perlu di waspadai karena secara normatif penduduk umur 15 tahun ke atas sudah harus mencapai 100 persen seiring dengan program pembangunan pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun yang telah dilaksanakan lebih dari 15 tahun yang lalu.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://bali.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
Jl. Raya Puputan No. 1 Renon Denpasar 80226
Telp. (0361) 238159, Fax. (0361) 238162
Homepage: <http://bali.bps.go.id>
E-mail: bps5100@bps.go.id